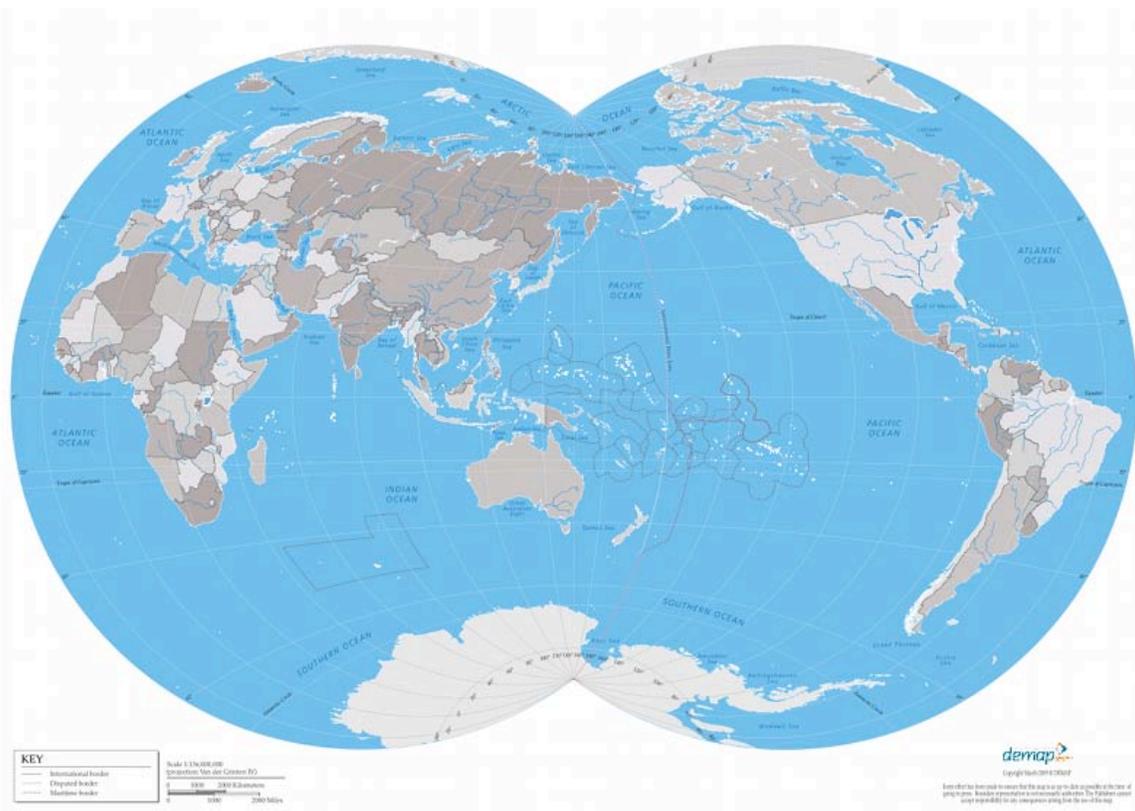




NAUTILUS INSTITUTE
Australia

Pengadilan Internasional bagi Timor-Leste:

ide yang tak mau pergi



Patrick Walsh

Austral Policy Forum 09-17B

27 Augustus 2009

In partnership with
 **RMIT** University

Ringkasan:

Patrick Walsh, Penasehat Senior untuk Sekretariat Teknik Paska-CAVR, menulis mengenai pemunculan kembali “ide mengenai suatu pengadilan internasional untuk kejahatan-kejahatan masa lalu di Timor-Leste”. Walsh menulis bahwa “bagi banyak orang, hal tersebut pada dasarnya bukanlah mengenai Indonésia”, tetapi mengenai “nasib kemanusiaan” dan harus dimengerti sebagai sebagian “perjuangan keras untuk mengatasi impunitas yang telah mengizinkan terjadinya apa yang secara begitu kuat disebut sebagai ‘kejahatan terhadap kemanusiaan’”. Pada akhirnya, Walsh menulis bahwa “secara lebih nyata, orang juga terus kembali ke ide ini karena mereka percaya bahwa keadilan adalah hal terpenting untuk mempertahankan perdamaian yang berkelanjutan.”

Tentang penulis:

Patrick Walsh adalah penasehat senior untuk Sekretariat Teknik Paska-CAVR Dili, Timor-Leste (www.cavr-timorleste.org)
Email: padiwalsh@gmail.com

Karena berbagai keadaan, ide mengenai suatu pengadilan internasional untuk kejahatan-kejahatan masa lalu di Timor-Leste kembali dibicarakan.

Mengapit periode pembicaraan ini adalah film *Balibo* tentang peristiwa 1975, yang kini sedang diputar luas di Australia dan Timor-Leste, dan ulang-tahun kesepuluh Jajak Pendapat 1999, yang kini tengah dirayakan di Timor-Leste. Dua hal ini menghidupkan kembali ingatan kuat mengenai kekerasan penuh darah pada awal dan akhir masa pendudukan Indonesia, dan mendorong orang untuk kembali bertanya: apa yang terjadi dengan akuntabilitas yang konon begitu penting bagi dunia modern?

Ide ini tidaklah baru. Beberapa penyelidikan yang disponsori oleh PBB sejak 1999 telah menyerukan diadakannya pengadilan internasional di Timor-Leste. Di Timor-Leste sendiri, Kongres Resistansi yang dipanggil bersidang oleh Xanana Gusmao di Dili pada 2000, yang merupakan pertemuan wakil-wakil dari seluruh partai politik serta kelompok-kelompok yang membentuk Dewan Resistansi Nasional Timor (CNRT), menyerukan “pembentukan Pengadilan Internasional untuk mengadili jenderal-jenderal Indonesia.”

Komisi kebenaran Timor-Leste (CAVR) juga mempertimbangkan ide ini. Meski tidak mempromosikan ide tersebut, sebagaimana yang telah diaku oleh beberapa pihak, komisi kebenaran Timor-Leste (CAVR) tidaklah menolaknya. CAVR lebih menyukai bila Indonesia menangani kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh mereka yang ada dalam yurisdiksinya, dan merekomendasikan agar Indonesia juga membantu tindak pengadilan di Timor-Leste. CAVR juga merekomendasikan bahwa, bila ada kegagalan dalam hal ini, pilihan mengenai pengadilan internasional haruslah dipertimbangkan kembali oleh komunitas internasional. (Chega! Rekomendasi 7.2.)

Ambivalensi yang dapat dirasakan dalam posisi CAVR juga dimiliki oleh banyak pihak. Jose Ramos-Horta menunjukkannya secara sangat jelas dalam *The Diplomat*, film dokumenter tentang karir diplomatiknya. Saat menyaksikan penghancuran di Timor-Leste pada 1999, dengan marah ia berkomentar: “Haruslah ada pengadilan untuk kejahatan perang. Akan ada 100 orang yang bakal berbaris untuk diadili.” Tapi, belakangan dalam dokumenter tersebut, ia difilmkan tengah berkata kepada pasukan Timor-Leste: “Janganlah kita membenci mereka [militer Indonesia]. Kita harus memaafkan mereka, mengulurkan tangan kita dan menawarkan kasih kita. Bila kita melakukan hal ini, Timor-Leste akan jadi tempat yang lebih baik.”

Sebagai presiden, Ramos-Horta menanggalkan sikap tak pastinya yang awal dan secara terbuka serta teratur menentang ide pengadilan internasional. Pada Juni, ia mencoret pilihan pengadilan internasional ini saat berkomentar dalam pertemuan konsultasi tentang kebenaran, keadilan, dan rekonsiliasi, yang disponsori oleh pemerintah Norwegia. Beberapa waktu kemudian, pada 6 Juli, ia menyerang habis-habisan proposal tersebut dalam suatu pidato usai makan malam dengan para peserta konferensi Universitas Victoria yang diadakan di Dili.

Meski dimaksudkan untuk mengubur ide tersebut, komentar-komentar sang presiden juga telah berefek membangkitkan pemikiran serta perdebatan mengenai keunggulan ide itu.

Dua hal utama muncul dalam diskusi-diskusi ini. Bagi banyak orang, hal tersebut pada dasarnya bukanlah mengenai Indonesia. Menafikan pembicaraan mengenai pengadilan internasional semata-mata sebagai “pembalasan dendam” adalah salah memahaminya. Bagi banyak orang, masalah utamanya adalah nasib kemanusiaan dan perlunya menarik garis dalam perjuangan keras untuk mengatasi impunitas yang telah mengizinkan terjadinya apa yang secara begitu kuat disebut sebagai “kejahatan terhadap kemanusiaan.” Bagi mereka, sungguhlah tak dapat diterima untuk memikirkan bahwa Timor-Leste, yang telah menggunakan dan diuntungkan secara signifikan oleh hukum internasional dalam perjuangan panjangnya untuk bernapas bebas, kini tidak memainkan peran dalam upaya global ini, dan, lebih buruk lagi, malah melemahkannya.

Secara lebih nyata, orang juga terus kembali ke ide ini karena mereka percaya bahwa keadilan adalah hal terpenting untuk mempertahankan perdamaian yang berkelanjutan, dan mereka tak melihat pilihan lain. Argumennya adalah: bila Timor-Leste tak dapat memberikan keadilan dan Indonesia tak mau melakukannya, maka hal itu menjadi tanggungjawab internasional—terlebih bila mempertimbangkan sifat kejahatan yang terjadi di Timor-Leste dan keterlibatan banyak pihak dalam komunitas internasional dalam pelanggaran-pelanggaran tersebut. Argumen ini memiliki kekuatan tambahan di Timor-Leste akibat kegagalan Parlemen untuk merespons laporan CAVR. Parlemen tampak tak menyadari fakta bahwa hambatan yang menerus terhadap *Chega!* berkontribusi pada militansi yang kian berkembang dan juga merupakan politik yang buruk.

Permalink

<http://www.globalcollab.org/Nautilus/australia/apsnet/policy-forum/2009/walsh-ind.pdf>

Austral Peace and Security Network minta balasan Anda:

Tolong kirim balasan kepada: austral@rmit.edu.au.

Pendapat dalam artikel ini adalah pendapat penulis dan tidak memantulkan kebijakan atau posisi resmi Nautilus Institute.

Nautilus Institute at RMIT, GPO Box 2476V,
Melbourne Victoria 3001, Australia
ph: +61 3 9925 3170, email: austral@rmit.edu.au